



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I**  
**KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH**  
Alamat Jl. Dewi Sartika No. 23 Palu 94114  
Telepon (0451) 481205, Faksimile (0451) 482353

Laman : <http://sulteng.kemenkumham.go.id>. Email: [kanwil.sulteng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil.sulteng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W24-OT 03.01 - 1229 01 Maret 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 ( Satu) Berkas  
Hal : Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah

Yth. Kepala Biro Perencanaan  
Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI  
Di Jakarta

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-13.OT.03.01 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020 – 2024, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Tahun 2024. (Rencana Aksi terlampir)

Demikian kami sampaikan untuk diperiksa, atasnya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hermansyah Siregar  
NIP.197010161993031001

Tembusan:  
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI  
Di Jakarta.

RENCANA KEGIATAN PERJANJIAN KINERJA DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2024

1. DUKUNGAN MANAJEMEN KANTOR WILAYAH

| SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET KINERJA | RUMUS PERHITUNGAN                                     | KEGIATAN  | PAGU           | RENCANA PENARIKAN DANA | REALISASI ANGGARAN | RENCANA KEGIATAN  | CAPAIAN   | DATA DUKUNG   | STATUS PELAKSANAAN   | KETERANGAN   |
|--|--|----------------|---|---|----------------|------------------------|--------------------|---|---|---|--|--|
| 1. Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien | 1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah | 3,1 INDEKS     | $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ | <p><b>A. Melaksanakan layanan internal yang berkualitas di lingkungan Kanwil Kemenkumham dengan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;</li> <li>Penguatan Reformasi Birokrasi;</li> <li>Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan;</li> <li>Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);</li> <li>Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kepegawaian;</li> </ol> <p><b>B. Pelaksanakan survei internal dari sisi integritas seluruh pegawai setiap bulan secara online melalui <a href="https://survei.balibangham.go.id">https://survei.balibangham.go.id</a>.</b></p> | 16.419.947.000 | 4.310.494.781          |                    | TW I<br>1. Melaksanakan dan memberikan pelayanan meliputi :<br>a. Layanan Dukungan Manajemen Internal<br>b. Layanan Perkantoran<br>c. Layanan Manajemen SDM Internal<br>d. Layanan Layanan Manajemen Kinerja Internal<br>2. Melakukan monitoring dan evaluasi (monev) triwulan I untuk mengidentifikasi hambatan dan solusi.<br>3. Melakukan review dan revisi target jika diperlukan.<br>4. Meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi antar anggota Divisi Administrasi.                               | TW I<br>tercapainya nilai Indeks $\geq 3,1$ setiap bulannya   | 1. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan<br>2. Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi per Tri Wulan . | sebagian kegiatan telah dilaksanakan di bulan Januari dan Februari | Pelaporan Data Dukung akan dilaporkan pada setiap Awal triwulan Berikutnya |
|  |  |                |   |   |                | 5.593.860.704          |                    | TW II<br>1. Melaksanakan dan memberikan pelayanan meliputi :<br>a. Layanan Dukungan Manajemen Internal<br>b. Layanan Perkantoran<br>c. Layanan Manajemen SDM Internal<br>d. Layanan Layanan Manajemen Kinerja Internal<br>2. Melakukan monitoring dan evaluasi (monev) triwulan II untuk mengidentifikasi hambatan dan solusi.<br>3. Melakukan review dan revisi target jika diperlukan.<br>4. Meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi antar anggota Divisi Administrasi.                             | TW II<br>tercapainya nilai Indeks $\geq 3,1$ setiap bulannya  | 1. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan<br>2. Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi per Tri Wulan . |  | Pelaporan Data Dukung akan dilaporkan pada setiap Awal triwulan Berikutnya |
|  |  |                |   |   |                | 3.840.661.908          |                    | TW III<br>1. Melaksanakan dan memberikan pelayanan meliputi :<br>a. Layanan Dukungan Manajemen Internal<br>b. Layanan Perkantoran<br>c. Layanan Manajemen SDM Internal<br>d. Layanan Layanan Manajemen Kinerja Internal<br>2. Melakukan monitoring dan evaluasi (monev) triwulan III untuk mengidentifikasi hambatan dan solusi.<br>3. Melakukan review dan revisi target jika diperlukan.<br>5. Meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi antar anggota Divisi Administrasi.                           | TW III<br>tercapainya nilai Indeks $\geq 3,1$ setiap bulannya | 1. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan<br>2. Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi per Tri Wulan . |  | Pelaporan Data Dukung akan dilaporkan pada setiap Awal triwulan Berikutnya |
|  |  |                |   |   |                | 2.674.929.607          |                    | TW IV<br>1. Melaksanakan dan memberikan pelayanan meliputi :<br>a. Layanan Dukungan Manajemen Internal<br>b. Layanan Perkantoran<br>c. Layanan Manajemen SDM Internal<br>d. Layanan Layanan Manajemen Kinerja Internal<br>2. Melakukan akselerasi pencapaian target kinerja yang belum terpenuhi.<br>3. Melakukan finalisasi laporan kinerja tahunan.<br>4. Melakukan refleksi dan evaluasi kinerja divisi secara menyeluruh.<br>5. Merumuskan strategi dan rencana pengembangan divisi untuk tahun berikutnya. | TW IV<br>tercapainya nilai Indeks $\geq 3,1$ setiap bulannya  | 1. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan   |  | Pelaporan Data Dukung akan dilaporkan pada Akhir Tahun                     |

**1.DIVISI PEMASYARAKATAN KANTOR WILAYAH**

| SASARAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET KINERJA | RUMUS PERHITUNGAN   | KEGIATAN   | PAGU        | RENCANA PENARIKAN DANA | REALISASI ANGGARAN | RENCANA KEGIATAN | CAPAIAN  | DATA DUKUNG | STATUS PELAKSANAAN | KETERANGAN |                               |  |
|---|--|----------------|---|--|-------------|------------------------|--------------------|------------------|--|-------------|--------------------|------------|-------------------------------|--|
| 1. penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah   | 1. Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah  | 83%            | $\frac{\text{Presentase} = \frac{A + B + C + D + E + F + G + H + I}{100\% \text{ dibagi } 9} \times 100\%}{\text{Target}}$  | melakukan kegiatan pengumpulan dan perhitungan 1. Indeks terkait Kepuasan layanan Pemasyarakatan, 2. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan, 3 Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan, 4. Indeks Pelayanan Tahanan, 5. Indeks Pengelolaan Basan Baran, 6. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana, 7. Indeks Pemenuhan Hak Napi, 8. Indeks Khusus Anak, 9. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan | 912.881.000 | 159.229.000            | Nihil              | TW I             | Melakukan permintaan data dukung berupa perhitungan indeks terkait kepuasan layanan  | TW I        | Belum terlaksana   | Laporan    | belum terlaksana              | masih dalam tahap proses kegiatan yang |
|   |  |                |   |  |             | 313.013.000            | Nihil              | TW II            | Melakukan permintaan data dukung berupa perhitungan indeks terkait kepuasan layanan pemasyarakatan dari Badan Strategis Kebijakan, serta permintaan indeks data dukung pelayanan tahanan dari UPT Rutan, permintaan data dukung indeks pembinaan narapidana ke UPT Lapas dan Rutan, permintaan data dukung indeks terkait pengelolaan Basan Baran ke UPT Rupbasan, permintaan data dukung indeks anak ke pihak LPKA dan pembinaan Klien ke pihak BAPAS | TW II       | belum terlaksana   | Laporan    | belum terlaksana              | Belum dilaksanakan                     |
|   |  |                |   |  |             | 387.839.000            | Nihil              | TW III           | Melakukan permintaan data dukung berupa perhitungan indeks terkait kepuasan layanan pemasyarakatan dari Badan Strategis Kebijakan, serta permintaan indeks data dukung pelayanan tahanan dari UPT Rutan, permintaan data dukung indeks pembinaan narapidana ke UPT Lapas dan Rutan, permintaan data dukung indeks terkait pengelolaan Basan Baran ke UPT Rupbasan, permintaan data dukung indeks anak ke pihak LPKA dan pembinaan Klien ke pihak BAPAS | TW III      | belum terlaksana   | Laporan    | belum terlaksana              | Belum dilaksanakan                     |
|   |  |                |   |  |             | 52.800                 | Nihil              | TW IV            | Melakukan permintaan data dukung berupa perhitungan indeks terkait kepuasan layanan pemasyarakatan dari Badan Strategis Kebijakan, serta permintaan indeks data dukung pelayanan tahanan dari UPT Rutan, permintaan data dukung indeks pembinaan narapidana ke UPT Lapas dan Rutan, permintaan data dukung indeks terkait pengelolaan Basan Baran ke UPT Rupbasan, permintaan data dukung indeks anak ke pihak LPKA dan pembinaan Klien ke pihak BAPAS | TW IV       | belum terlaksana   | Laporan    | belum terlaksana              | belum dilaksanakan                     |
| 2. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah | 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar | 85%            | $\frac{\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Napi/Tah, anak} \times 100\%}{\text{Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak}}}{\text{Target}}$ |  | Nihil       | Nihil                  | Nihil              | TW I             | Membuat grup internal penerimaan BAMA untuk memonitor penerimaan, pengolahan dan penyajian BAMA untuk WBP setiap hari  | TW I        | 85%                | Laporan    | Masih dalam tahap pelaksanaan |  |
|   |  |                |   |  |             | Nihil                  | Nihil              | TW II            | Rutin melakukan Monev ke UPT terkait BAMA  | TW II       | 85%                | Laporan    | Belum dilaksanakan            | Belum dilaksanakan                     |
|   |  |                |   |  |             | Nihil                  | Nihil              | TW III           | Memberikan penguatan kepada pegawai/panitia BAMA di UPT untuk melakukan pengawalan terhadap penyelenggaraan BAMA sesuai kontrak  | TW III      | 85%                | Laporan    | Belum dilaksanakan            | Belum dilaksanakan                     |
|   |  |                |   |  |             | Nihil                  | Nihil              | TW IV            | Rutin melakukan Monev ke UPT terkait BAMA  | TW IV       | 85%                | Laporan    | Belum dilaksanakan            | Belum dilaksanakan                     |

RENCANA KEGIATAN PERJANJIAN KINERJA DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SUBBID PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM TAHUN ANGGARAN 2024

**3.DIVISI PELAYANAN HUKUM KANTOR WILAYAH AHU**

| SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET KINERJA | RUMUS PERHITUNGAN  | KEGIATAN  | PAGU (Rp)     | RENCANA PENARIKAN DANA (Rp) | REALISASI ANGGARAN                                    | RENCANA KEGIATAN | CAPAIAN   | DATA DUKUNG | STATUS PELAKSANAAN  | KETERANGAN   |   |                             |
|--|---|----------------|--|---|---------------|-----------------------------|---|------------------|---|-------------|---|--|---|-----------------------------|
| Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah   | Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah  | 5%             | Jumlah PNBP tahun berjalan dikurang jumlah PNBP tahun sebelumnya, dibagi jumlah PNBP tahun sebelumnya, dikali 100% | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendaftaran dan penghapusan/Roya jaminan fidusia</li> <li>- Pendaftaran Badan Usaha dan Badan Hukum</li> <li>- Layanan Legalisasi Apostille</li> </ul>   | 1.291.362.000 | 467.076.000                 | Realisasi akan dilaporkan pada akhir periode Triwulan | TW I             | Melaksanakan Koordinasi dengan pihak/Instansi Terkait yang dapat menunjang peningkatan PNBP di wilayah  | TW I        | Terjalin kerjasama antar instansi yang mendukung pencapaian Kinerja   | Laporan Pelaksanaan Kegiatan   | Telah dilaksanakan pertemuan antar pimpinan Instansi dalam rencana Kolaborasi Layanan | {KETERANGAN DETAIL CAPAIAN} |
|  |   |                |  |   |               | 416.902.000                 | Realisasi akan dilaporkan pada akhir periode Triwulan | TW II            | Melakukan Kolaborasi Layanan bersama Instansi Terkait dalam Penyebaran Informasi dan Edukasi Informasi melalui Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi Layanan Subbidang AHU, serta melibatkan Outsourcing dalam peningkatan layanan | TW II       | Peningkatan pemahaman masyarakat tentang layanan Administrasi Hukum Umum, sehingga terjadi peningkatan PNBP               | Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi, dan/atau Laporan Pelaksanaan Penyebaran Informasi Layanan AHU  | Tahap Perencanaan   | {KETERANGAN DETAIL CAPAIAN} |
|  |   |                |  |   |               | 297.278.000                 | Realisasi akan dilaporkan pada akhir periode Triwulan | TW III           | Melakukan Kolaborasi Layanan bersama Instansi Terkait dalam Penyebaran Informasi dan Edukasi Informasi melalui Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi Layanan Subbidang AHU, serta melibatkan Outsourcing dalam peningkatan layanan | TW III      | Peningkatan pemahaman masyarakat tentang layanan Administrasi Hukum Umum, sehingga terjadi peningkatan PNBP               | Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi, dan/atau Laporan Pelaksanaan Penyebaran Informasi Layanan AHU  | Tahap Perencanaan   | {KETERANGAN DETAIL CAPAIAN} |
|  |   |                |  |   |               | 110.106.000                 | Realisasi akan dilaporkan pada akhir periode Triwulan | TW IV            | Melakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Layanan Administrasi Hukum Umum  | TW IV       | Diperoleh hasil Monitoring dan evaluasi untuk perbaikan layanan yang dapat mendukung peningkatan PNBP di Tahun berikutnya | Notulen Rapat Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi   | Tahap Perencanaan   | {KETERANGAN DETAIL CAPAIAN} |
| Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan Notaris di Kantor Wilayah | Persentase Laporan Pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan | 88%            | Jumlah Laporan yang ditangani dibagi jumlah seluruh Laporan Pengaduan, dikali 100%                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pembinaan dan pengawasan permasalahan kenotariatan melalui pemeriksaan berkala</li> <li>- Memproses surat pengaduan masyarakat dan surat dari Aparat Penegak hukum (APH) terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah</li> </ul> | 795.422.000   | 13.440.000                  | Realisasi akan dilaporkan pada akhir periode Triwulan | TW I             | Melakukan Rapat terkait Rencana Pembinaan dan Pengawasan Notaris Tahun 2024, dan memproses Laporan Pengaduan Masyarakat   | TW I        | Diperoleh strategi terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris Tahun 2024, dan memproses Laporan Pengaduan Masyarakat       | Notulen Rapat terkait Rencana Pembinaan dan Pengawasan Notaris Tahun 2024, dan Surat Balasan Pengaduan Masyarakat, dan/atau Surat dari Pihak APH | Tahap Perencanaan   | {KETERANGAN DETAIL CAPAIAN} |
|  |   |                |  |   |               | 259.240.000                 | Realisasi akan dilaporkan pada akhir periode Triwulan | TW II            | Melakukan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris, serta memproses Laporan Pengaduan masyarakat  | TW II       | Diperoleh Hasil Pemeriksaan Berkala terhadap Notaris, serta Surat Balasan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Majelis Pemeriksa | Laporan Pemeriksaan Berkala terhadap Notaris, dan Surat Balasan Pengaduan Masyarakat, dan/atau Surat dari Pihak APH                              | Tahap Perencanaan   | {KETERANGAN DETAIL CAPAIAN} |
|  |   |                |  |   |               | 274.488.000                 | Realisasi akan dilaporkan pada akhir periode Triwulan | TW III           | Melakukan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris, serta memproses Laporan Pengaduan masyarakat  | TW III      | Diperoleh Hasil Pemeriksaan Berkala terhadap Notaris, serta Surat Balasan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Majelis Pemeriksa | Laporan Pemeriksaan Berkala terhadap Notaris, dan Surat Balasan Pengaduan Masyarakat, dan/atau Surat dari Pihak APH                              | Tahap Perencanaan   | {KETERANGAN DETAIL CAPAIAN} |
|  |   |                |  |   |               | 248.254.000                 | Realisasi akan dilaporkan pada akhir periode Triwulan | TW IV            | Melakukan Rapat Evaluasi terhadap Hasil Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas  | TW IV       | Diperoleh Hasil Monitoring dan evaluasi untuk perbaikan dalam kegiatan Pengawasan Notaris di Tahun berikutnya             | Notulen Rapat Evaluasi terhadap Hasil Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas   | Tahap Perencanaan   | {KETERANGAN DETAIL CAPAIAN} |

| SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET KINERJA | RUMUS PERHITUNGAN  | KEGIATAN   | PAGU  | RENCANA PENARIKAN DANA | REALISASI ANGGARAN                                    | RENCANA KEGIATAN | CAPAIAN   | DATA DUKUNG                  | STATUS PELAKSANAAN  | KETERANGAN                                     |                                |                             |
|--|--|----------------|--|--|---|------------------------|---|------------------|---|------------------------------|---|--|--------------------------------|-----------------------------|
| Terselenggaranya penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah | Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah   | 3,1 indeks     | hasil Survey pada eksternal yang dilaksanakan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM atas penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah                          | 1. Pemetaan wilayah yang berpotensi Pelanggaran KI   | 155.855.000   | 38.963.750             | Realisasi akan dilaporkan pada akhir periode Triwulan | TW I             | Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Pelaku Usaha untuk mencegah pelanggaran HKI  | TW I                         | Pemetaan Wilayah yang berpotensi Pelanggaran KI   | Laporan Koordinasi dan Pemetaan Wilayah        | sedang dalam tahap pelaksanaan | {KETERANGAN DETAIL CAPAIAN} |
|  |  |                |  |  |   | 38.963.750             | Realisasi akan dilaporkan pada akhir periode Triwulan | TW II            | Edukasi Informasi pada wilayah yang berpotensi Pelanggaran KI adapun tempat edukasi yaitu Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Tempat Hiburan | TW II                        | Terlaksananya kegiatan edukasi informasi Perlindungan Hukum KI  | Laporan Pelaksanaan Kegiatan                   | Tahap Perencanaan              | {KETERANGAN DETAIL CAPAIAN} |
|  |  |                |  |  |   | 38.963.750             | Realisasi akan dilaporkan pada akhir periode Triwulan | TW III           | Edukasi Informasi pada wilayah yang berpotensi Pelanggaran KI adapun tempat edukasi yaitu Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Tempat Hiburan | TW III                       | Terlaksananya kegiatan edukasi informasi Perlindungan Hukum KI  | Laporan Pelaksanaan Kegiatan                   | Tahap Perencanaan              | {KETERANGAN DETAIL CAPAIAN} |
|  |  |                |  |  |   | 38.963.750             | Realisasi akan dilaporkan pada akhir periode Triwulan | TW IV            | Monitoring, evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut  | TW IV                        | Rapat bersama aparat Penegak Hukum dan Pelaku usaha   | Laporan hasil Rapat Koordinasi                 | Tahap Perencanaan              | {KETERANGAN DETAIL CAPAIAN} |
| Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah         | Presentase Masyarakat yang memahami KI terhadap total masyarakat yang mendapatkan diseminasi/edukasi tentang KI di wilayah | 70%            | Jumlah Masyarakat yang memahami tentang KI setelah mengikuti Desiminasi/Edukasi <b>DIBAGI</b> Jumlah Masyarakat yang mengikuti Desiminasi/Edukasi <b>DIKALI</b> 100% | Sosialisasi ke Stakeholder terkait, Pihak Akademisi dan Edukasi KI kepada anak usia Dini melalui kegiatan RUKI | 1.028.900.000   | 257.225.000            |   | TW I             | Melakukan koordinasi pada pihak Dinas Terkait, Perguruan Tinggi, Sekolah,   | TW I                         | terlaksananya kegiatan koordinasi kepada dinas terkait, perguruan tinggi dan sekolah                                  | Laporan Pelaksanaan Kegiatan                   | sedang dalam tahap pelaksanaan | {KETERANGAN DETAIL CAPAIAN} |
|  |  |                |  |  |   | 257.225.000            |   | TW II            | Kolaborasi Kegiatan informasi Kekayaan Intelektual kepada pihak stakeholder terkait dan pihak akademisi   | TW II                        | Terlaksananya Kolaborasi Kegiatan informasi Kekayaan Intelektual kepada pihak stakeholder terkait dan pihak akademisi | Laporan Pelaksanaan Kegiatan                   | Tahap Perencanaan              | {KETERANGAN DETAIL CAPAIAN} |
|  |  |                |  |  |   | 257.225.000            |   | TW III           | Kolaborasi Kegiatan informasi Kekayaan Intelektual kepada pihak stakeholder terkait dan pihak akademisi   | TW III                       | Terlaksananya Kolaborasi Kegiatan informasi Kekayaan Intelektual kepada pihak stakeholder terkait dan pihak akademisi | Laporan Pelaksanaan Kegiatan                   | Tahap Perencanaan              | {KETERANGAN DETAIL CAPAIAN} |
|  |  |                |  |  |   | 257.225.000            |   | TW IV            | evaluasi dan tindak lanjut  | TW IV                        | Rapat terkait evaluasi dan tindak lanjut bersama tim layanan KI   | Laporan hasil Rapat Evaluasi dan tindak lanjut | Tahap Perencanaan              | {KETERANGAN DETAIL CAPAIAN} |
|  | Presentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di wilayah  | 17%            | Jumlah Permohonan KI Tahun berjalan <b>DIKURANGI</b> Jumlah Permohonan KI Tahun sebelumnya <b>DIBAGI</b> Jumlah Permohonan KI Tahun sebelumnya <b>DIKALI</b> 100%    | 257.225.000  | Realisasi akan dilaporkan pada akhir periode Triwulan | TW I                   | Persiapan Tim Layanan KI                              | TW I             | Tim Layanan KI  | Laporan Pelaksanaan Kegiatan | sedang dalam tahap pelaksanaan  | {KETERANGAN DETAIL CAPAIAN}                    |                                |                             |
|  |  |                |  | 257.225.000  | Realisasi akan dilaporkan pada akhir periode Triwulan | TW II                  | Pelaksanaan Kegiatan Layanan KI                       | TW II            | terlaksananya Pelayanan Pendampingan Pendaftaran KI   | Laporan Pelaksanaan Kegiatan | Tahap Perencanaan   | {KETERANGAN DETAIL CAPAIAN}                    |                                |                             |
|  |  |                |  | 257.225.000  | Realisasi akan dilaporkan pada akhir periode Triwulan | TW III                 | Pelaksanaan Kegiatan Layanan KI                       | TW III           | terlaksananya Pelayanan Pendampingan Pendaftaran KI   | Laporan Pelaksanaan Kegiatan | Tahap Perencanaan   | {KETERANGAN DETAIL CAPAIAN}                    |                                |                             |
|  |  |                |  | 257.225.000  | Realisasi akan dilaporkan pada akhir periode Triwulan | TW IV                  | Evaluasi Layanan KI                                   | TW IV            | Laporan evaluasi Layanan KI   | Laporan Hasil Evaluasi       | Tahap Perencanaan   | {KETERANGAN DETAIL CAPAIAN}                    |                                |                             |

| SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET KINERJA | RUMUS PERHITUNGAN   | KEGIATAN   | PAGU           | RENCANA PENARIKAN DANA | REALISASI ANGGARAN | RENCANA KEGIATAN  | CAPAIAN      | DATA DUKUNG   | STATUS PELAKSANAAN  | KETERANGAN |
|--|--|----------------|---|--|----------------|------------------------|--------------------|---|--------------|---|---|------------|
| Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah                | Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham         | 80%            | $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Capaian Kinerja}$ | Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah          | Rp 327.928.000 | Rp 97.789.000          | Rp -               | TW I<br>Persiapan dan Pelaksanaan Rapat Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah               | TW I<br>0%   | SK Kakanwil Kemenkumham Sulteng Nomor W.24-43.PP.04.02 Tahun 2024 Tanggal 08 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, Surat Selesai Harmonisasi (SSH) dan Berita Acara Pengharmonisasian (BAP) | Tahap persiapan berupa penyusunan SK TIM telah selesai, untuk kegiatan inti yaitu Rapat Fasilitasi Harmonisasi sementara berjalan |            |
|  |  |                |   |  |                | Rp 153.777.000         | Rp -               | TW II<br>Rapat Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah  | TW II<br>0%  | Surat Selesai Harmonisasi (SSH) dan Berita Acara Pengharmonisasian (BAP)  | Belum dilaksanakan  |            |
|  |  |                |   |  |                | Rp 279.699.000         | Rp -               | TW III<br>Rapat Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah                                       | TW III<br>0% | Surat Selesai Harmonisasi (SSH) dan Berita Acara Pengharmonisasian (BAP)  | Belum dilaksanakan  |            |
|  |  |                |   |  |                | Rp 327.928.000         | Rp -               | TW IV<br>Rapat Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Penyusunan Laporan                 | TW IV<br>0%  | Surat Selesai Harmonisasi (SSH) dan Berita Acara Pengharmonisasian (BAP) serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah   | Belum dilaksanakan  |            |
| Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundangundangan | Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan | 20 orang       | $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Capaian Kinerja}$ | Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Daerah | Rp 109.072.000 | Rp 49.560.000          | Rp -               | TW I<br>Persiapan dan Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan | TW I<br>0%   | SK Tim Kegiatan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan  | Belum dilaksanakan  |            |
|  |  |                |   |  |                | Rp 70.044.000          | Rp -               | TW II<br>Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan                          | TW II<br>0%  | Materi kegiatan Pandalaman Materi Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan  | Belum dilaksanakan  |            |
|  |  |                |   |  |                | Rp 108.137.000         | Rp -               | TW III<br>Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan                         | TW III<br>0% | Materi kegiatan Pandalaman Materi Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan  | Belum dilaksanakan  |            |
|  |  |                |   |  |                | Rp 109.072.000         | Rp -               | TW IV<br>Penyusunan Laporan Kegiatan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan                   | TW IV<br>0%  | Materi kegiatan Pandalaman Materi Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Laporan Kegiatan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan  | Belum dilaksanakan  |            |

| SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET KINERJA   | RUMUS PERHITUNGAN  | KEGIATAN   | PAGU        | RENCANA PENARIKAN DANA | REALISASI ANGGARAN | RENCANA KEGIATAN   | CAPAIAN  | DATA DUKUNG            | STATUS PELAKSANAAN                 | KETERANGAN                         |                     |
|--|--|--|--|--|-------------|------------------------|--------------------|--|--|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1. Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM               | Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM                                      | 3 Instansi Pemerintah  | $x = \text{Jumlah provinsi atau Kab Kota di wilayah yang tercapai pada tahun berjalan} / \text{Jumlah provinsi atau Kab Kota di wilayah yang berpartisipasi pada tahun berjalan} \times 100\%$ | Rapat persiapan dan pelaksanaan Aksi HAM, Koordinasi ke pemerintah daerah terkait dengan pendampingan kegiatan Aksi HAM, koordinasi dan konsultasi ke pusat terkait Pelaksanaan Aksi HAM   | 188.950.000 | 44.670.000             | -                  | TW I   | Rapat Persiapan Aksi HAM, kordinasi dan Konsultasi ke pusat terkait Aksi HAM   | TW I                   | {CAPAIAN TRIWULAN I}               | Laporan Kegiatan, Dokumentasi, dll | sedang dilaksanakan |
|  |  |  |  |  |             | 89.120.000             | -                  | TW II  | Pelaksanaan Rapat Aksi HAM dan Koordinasi Ke Kabupaten terkait dengan pendampingan kegiatan Aksi HAM   | TW II                  | {CAPAIAN TRIWULAN II}              | Laporan Kegiatan, Dokumentasi, dll | belum dilaksanakan  |
|  |  |  |  |  |             | 19.880.000             | -                  | TW III   | Koordinasi Ke Kabupaten terkait dengan pendampingan kegiatan Pelaksanaan Aksi HAM  | TW III                 | {CAPAIAN TRIWULAN III}             | Laporan Kegiatan, Dokumentasi, dll | belum dilaksanakan  |
|  |  |  |  |  |             | 35.280.000             | -                  | TW IV  | Evaluasi dan Pelaporan Aksi HAM, kordinasi dan Konsultasi ke pusat terkait Aksi HAM sekaligus menghadiri Kegiatan peringatan Hari HAM Sedunia        | TW IV                  | {CAPAIAN TRIWULAN IV}              | Laporan Kegiatan, Dokumentasi, dll | belum dilaksanakan  |
|  | Jumlah Kab/kota peduli HAM   | 2 Instansi Pemerintah  | $x = \text{Jumlah kabupaten kota di wilayah yang mendapatkan predikat peduli HAM} / \text{Jumlah kabupaten kotadi wilayah yang berpartisipasi} \times 100\%$                                   | Rapat persiapan dan Pelaksanaan Kab Kota Peduli HAM, koordinasi terkait pendampingan Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM,  | 60.870.000  | 9.480.000              | -                  | TW I   | Rapat Persiapan Kabupaten/Kota Peduli HAM  | TW I                   | {CAPAIAN TRIWULAN I}               | Laporan Kegiatan, Dokumentasi, dll | sedang dilaksanakan |
|  |  |  |  |  |             | 32.760.000             | -                  | TW II  | Rapat Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/kota Peduli HAM, Koordinasi ke Pemerintah daerah Kab/kota terkait pendampingan Kab/kota peduli HAM | TW II                  | {CAPAIAN TRIWULAN II}              | Laporan Kegiatan, Dokumentasi, dll | belum dilaksanakan  |
|  |  |  |  |  |             | 17.880.000             | -                  | TW III   | Koordinasi ke Pemerintah daerah Kab/kota untuk mendorong Kab/kota peduli HAM   | TW III                 | {CAPAIAN TRIWULAN III}             | Laporan Kegiatan, Dokumentasi, dll | belum dilaksanakan  |
|  |  |  |  |  |             | 750.000                | -                  | TW IV  | Pemantauan dan Evaluasi Kab/Kota   | TW IV                  | {CAPAIAN TRIWULAN IV}              | Laporan Kegiatan, Dokumentasi, dll | belum dilaksanakan  |
| Jumlah Instansi Pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM | 1 Instansi Pemerintah  | $x = \text{Jumlah Instansi Pemerintah di wilayah yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan HAM} / \text{Jumlah Target Diseminasi di wilayah} \times 100\%$ | Pelaksanaan Rapat Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah  | 14.920.000   | -           | -                      | TW I               |  | TW I   | {CAPAIAN TRIWULAN I}   |                                    |                                    |                     |
|  |  |  |  |  | 1.200.000   | -                      | TW II              | Koordinasi terkait Pelaksanaan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah | TW II  | {CAPAIAN TRIWULAN II}  | Laporan Kegiatan, Dokumentasi, dll | belum dilaksanakan                 |                     |
|  |  |  |  |  | 12.970.000  | -                      | TW III             | Rapat Pelaksanaan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah              | TW III   | {CAPAIAN TRIWULAN III} | Laporan Kegiatan, Dokumentasi, dll | belum dilaksanakan                 |                     |
|  |  |  |  |  | 750.000     | -                      | TW IV              | Evaluasi dan Pelaporan Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah         | TW IV  | {CAPAIAN TRIWULAN IV}  | Laporan Kegiatan, Dokumentasi, dll | belum dilaksanakan                 |                     |
| 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di Wilayah      | Presentase Dugaan Pelanggaran HAM yang di tindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di kewilayahan | 2 Rekomendasi  | $x = \text{Jumlah dugaan pelanggaran HAM yang di tindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di kewilayahan} / \text{Total dugaan pelanggaran HAM pada tahun berjalan} \times 100\%$               | Koordinasi terkait Identifikasi dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah, Rapat Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM, Penyusunan Rekomendasi Penanganan dugaan pelanggaran HAM, Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran HAM di wilayah | 45.007.000  | 11.640.000             | -                  | TW I   | Koordinasi dan Konsultasi dugaanPelanggaran HAM di Wilayah   | TW I                   | {CAPAIAN TRIWULAN I}               | Laporan Kegiatan, Dokumentasi, dll | belum dilaksanakan  |
|  |  |  |  |  |             | 8.530.000              | -                  | TW II  | Rapat Koordinasi dan Konsultasi dugaanPelanggaran HAM di Wilayah   | TW II                  | {CAPAIAN TRIWULAN II}              | Laporan Kegiatan, Dokumentasi, dll | belum dilaksanakan  |
|  |  |  |  |  |             | 21.230.000             | -                  | TW III   | Penyusunan Rekomendasi Penanganan dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah dan Koordinasi dan Konsultasi dugaanPelanggaran HAM di Wilayah                   | TW III                 | {CAPAIAN TRIWULAN III}             | Laporan Kegiatan, Dokumentasi, dll | belum dilaksanakan  |
|  |  |  |  |  |             | 3.607.000              | -                  | TW IV  | Pemantauan, Evaluasi danPelaporan Pelaksanaan Penanganan dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah   | TW IV                  | {CAPAIAN TRIWULAN IV}              | Laporan Kegiatan, Dokumentasi, dll | belum dilaksanakan  |
|  | Tersedianya Rekomendasi Perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah                  | 1 Rekomendasi  | $x = \text{Jumlah rekomendasi terkait produk hukum daerah berprespektif HAM yang di berikan} / \text{jumlah produk hukum daerah yang di analisis} \times 100\%$                                | Koordinasi terkait Identifikasi Rancangan PUU berbasis HAM di Wilayah, Rapat Perumusan Rekomendasi R-PUU berbasis HAM di wilayah, koordinasi terkait Pemantauan dan Evaluasi hasil rekomendasi R-PUU   | 11.700.000  | -                      | -                  | TW I   |  | TW I                   | {CAPAIAN TRIWULAN I}               |                                    |                     |
|  |  |  |  |  |             | 1.950.000              | -                  | TW II  | Koordinasi terkait Identifikasi Rancangan PUU berbasis HAM di Wilayah  | TW II                  | {CAPAIAN TRIWULAN II}              | Laporan Kegiatan, Dokumentasi, dll | belum dilaksanakan  |
|  |  |  |  |  |             | 1.200.000              | -                  | TW III   | koordinasi terkait Perumusan Rekomendasi R-PUU berbasis HAM di wilayah   | TW III                 | {CAPAIAN TRIWULAN III}             | Laporan Kegiatan, Dokumentasi, dll | belum dilaksanakan  |



RENCANA KEGIATAN PERJANJIAN KINERJA DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

BPHN

| SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET KINERJA | RUMUS PERHITUNGAN   | KEGIATAN   | PAGU             | RENCANA PENARIKAN DANA | REALISASI ANGGARAN | RENCANA KEGIATAN | CAPAIAN  | DATA DUKUNG | STATUS PELAKSANAAN | KETERANGAN   |  |
|--|---|----------------|---|--|------------------|------------------------|--------------------|------------------|--|-------------|--------------------|--|--|
| Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah Serta Fasilitasi Perencanaan Perda | Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Yang Dilakukan  | 1 Kegiatan     | $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Capaian Kinerja}$ | Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah            | Rp 56.044.000    | Rp 2.385.000           | Rp -               | TW I             | Persiapan Analisis dan Evaluasi Hukum  | TW I        | 0%                 | SK Kakanwil Kemenkumham Sulteng Nomor W.24-HN.01.01-83 Tahun 2024 Tanggal 31 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Analisa dan Evaluasi Hukum   | Tahap Persiapan berupa penyusunan SK Tim telah selesai dilaksanakan  |
|  |   |                |   |  |                  | Rp 21.933.000          | Rp -               | TW II            | Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum  | TW II       | 0%                 | Laporan Pelaksanaan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum menyesuaikan Petunjuk Pelaksanaan dari BPHN   | Belum dilaksanakan   |
|  |   |                |   |  |                  | Rp 43.556.000          | Rp -               | TW III           | Perumusan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum  | TW III      | 0%                 | Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum  | Belum dilaksanakan   |
|  |   |                |   |  |                  | Rp 56.044.000          | Rp -               | TW IV            | Penyusunan Laporan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum  | TW IV       | 0%                 | Laporan Hasil Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum   | Belum dilaksanakan   |
| Jumlah Fasilitasi Perencanaan Perda  | 1 Kegiatan  | 1 Kegiatan     | $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Capaian Kinerja}$ | Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah | Rp 85.807.000    | Rp -                   | Rp -               | TW I             | Kegiatan belum dilaksanakan karena menunggu untuk disesuaikan dengan kegiatan dari Pemerintah Daerah | TW I        | 0%                 | SK Kakanwil Kemenkumham Sulteng Nomor W.24.68.HN.01.02 Tahun 2024 Tanggal 24 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik                              | Tahap Persiapan berupa penyusunan SK Tim telah selesai dilaksanakan  |
|  |   |                |   |  |                  | Rp 34.301.000          | Rp -               | TW II            | Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah                          | TW II       | 0%                 | Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah  | Belum dilaksanakan   |
|  |   |                |   |  |                  | Rp 74.167.000          | Rp -               | TW III           | Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah                          | TW III      | 0%                 | Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah  | Belum dilaksanakan   |
|  |   |                |   |  |                  | Rp 85.807.000          | Rp -               | TW IV            | Penyusunan Laporan Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah                   | TW IV       | 0%                 | Laporan Akhir Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah  | Belum dilaksanakan   |
| Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah   | Persentase Anggota JDIHN Yang Dikelola Terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah                                    | 25%            | $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Capaian Kinerja}$ | Pengelolaan Anggota JDIHN di Wilayah                   | Rp 99.381.000    | Rp 5.670.000           | Rp -               | TW I             | Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Berupa Penyusunan SK Tim  | TW I        | 0%                 | SK Kakanwil Kemenkumham Sulteng Nomor W24-54.HN.03.05 Tahun 2024 Tanggal 19 Januari 2024 tentang Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sulawesi Tengah | Tahap Persiapan berupa penyusunan SK Tim telah selesai dilaksanakan  |
|  |   |                |   |  |                  | Rp 90.007.000          | Rp -               | TW II            | Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan JDIHN di Wilayah  | TW II       | 0%                 | Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan JDIHN di Wilayah  | Belum dilaksanakan   |
|  |   |                |   |  |                  | Rp 98.506.000          | Rp -               | TW III           | Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan JDIHN di Wilayah  | TW III      | 0%                 | Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan JDIHN di Wilayah  | Belum dilaksanakan   |
|  |   |                |   |  |                  | Rp 99.381.000          | Rp -               | TW IV            | Penyusunan Laporan Kegiatan Pengelolaan JDIHN di Wilayah   | TW IV       | 0%                 | Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan JDIHN di Wilayah  | Belum dilaksanakan   |
| Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah  | Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi Yang Diberikan Terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi | 82%            | $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Capaian Kinerja}$ | Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi                        | Rp 1.216.000.000 | Rp 300.000.000         | Rp -               | TW I             | Penyusunan Berkas Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Hukum                            | TW I        | 0%                 | Berkas Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Hukum   | Penandatanganan Perjanjian Kerjasama pelaksanaan kegiatan bantuan hukum antara Kanwil Kemenkumham Sulteng dengan 16 OBH terakreditasi telah selesai dilaksanakan |
|  |   |                |   |  |                  | Rp 630.000.000         | Rp -               | TW II            | Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi  | TW II       | 0%                 | Berkas Pencairan Anggaran Bantuan Hukum Litigasi   | Belum dilaksanakan   |
|  |   |                |   |  |                  | Rp 910.000.000         | Rp -               | TW III           | Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi  | TW III      | 0%                 | Berkas Pencairan Anggaran Bantuan Hukum Litigasi   | Belum dilaksanakan   |
|  |   |                |   |  |                  | Rp 1.216.000.000       | Rp -               | TW IV            | Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi                                 | TW IV       | 0%                 | Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi  | Belum dilaksanakan   |



| SASARAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET KINERJA | RUMUS PERHITUNGAN  | KEGIATAN   | PAGU            | RENCANA PENARIKAN DANA | REALISASI ANGGARAN | RENCANA KEGIATAN | CAPAIAN  | DATA DUKUNG  | STATUS PELAKSANAAN  | KETERANGAN   |   |  |   |   |
|---|--|----------------|--|--|-----------------|------------------------|--------------------|------------------|--|--|---|--|---|--|---|---|
| Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah | Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang ditindak lanjuti | 80%            | Rekomendasi yang dimanfaatkan : Rekomendasi yang dihasilkan x 100% | 1. Analisis Evaluasi Kebijakan Hukum dan HAM di Wilayah                            | Rp. 49.600.000  | 0                      | 0                  | TW I             | -  | TW I   | -   | -  | -   |  |   |   |
|   |  |                |  |  | Rp. 38.960.000  | 0                      | 0                  | TW II            | 1. Rapat FGD kegiatan Analisis Kebijakan<br>2. Pengumpulan Data Lapangan di Kabupaten<br>3. Kordinasi dan Konsultasi dengan Instansi Terkait | TW II  | -   | 1. Laporan Kegiatan<br>2. Laporan Pengumpulan Data | Belum dilaksanakan  | -  |   |   |
|   |  |                |  |  | Rp. 9.964.000   | 0                      | 0                  | TW III           | 1. Pengumpulan Data Lapangan di Kabupaten  | TW III   | -   | 1. Laporan Pengumpulan Data                        | Belum dilaksanakan  | -  |   |   |
|   |  |                |  |  | 0               | 0                      | 0                  | TW IV            | -  | TW IV  | -   | -  | -   | -  |   |   |
|   |  |                |  | 2. Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM                                 | Rp. 112.304.000 | Rp. 36.808.000         | 0                  | 0                | TW I   | 1. Rapat Pengolahan dan Analisa Data Sipkumham<br>2. Kordinasi dan konsultasi ke unit Eselon I<br>3. Verifikasi Pengumpulan Data Lapangan    | TW I  | -  | 1. Laporan Kegiatan<br>2. Laporan Pengumpulan Data Lapangan | Belum dilaksanakan   | -   |   |
|   |  |                |  |  | Rp. 35.844.000  | 0                      | 0                  | 0                | TW II  | 1. Rapat Pengolahan dan Analisa Data Sipkumham<br>2. Verifikasi Pengumpulan Data Lapangan<br>3. Kordinasi dan Konsultasi ke Instansi Terkait | TW II   | -  | 1. Laporan Kegiatan<br>2. Laporan Pengumpulan Data Lapangan | Belum dilaksanakan   | -   |   |
|   |  |                |  |  | Rp. 28.012.000  | 0                      | 0                  | 0                | TW III   | 1. Rapat Pengolahan dan Analisa Data Sipkumham<br>2. Verifikasi Pengumpulan Data Lapangan<br>3. Kordinasi dan Konsultasi ke Instansi Terkait | TW III  | -  | 1. Laporan Kegiatan<br>2. Laporan Pengumpulan Data Lapangan | Belum dilaksanakan   | -   |   |
|   |  |                |  |  | Rp. 14.760.000  | 0                      | 0                  | 0                | TW IV  | 1. Rapat Pengolahan dan Analisa Data Sipkumham<br>2. Verifikasi Pengumpulan Data Lapangan<br>3. Kordinasi dan Konsultasi ke Instansi Terkait | TW IV   | -  | 1. Laporan Kegiatan<br>2. Laporan Pengumpulan Data Lapangan | Belum dilaksanakan   | -   |   |
|   |  |                |  | 3. Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IPK-IKM. | Rp. 151.890.000 | Rp. 57.970.000         | Rp. 2.500.000      | 0                | 0  | TW I   | 1. Rapat Persentasi Proposal IPK-IKM<br>2. Pengumpulan Data Lapangan hasil survei<br>3. Verifikasi Lapangan data Hasil Survei<br>4. Pendampingan Penilaian Indeks Reformasi Hukum | TW I   | -   | 1. Laporan Kegiatan<br>2. Laporan Pengumpulan Data Lapangan<br>3. Laporan hasil Verifikasi hasil survei<br>4. Laporan Pendampingan IRH | 1. Melaksanakan Verifikasi Lapangan data Hasil Survei ke LPKA Palu<br>2. Melaksanakan Pendampingan Penilaian Indeks Reformasi Hukum ke Biro Hukum Propinsi dan Bagian Hukum Kota Palu | - |
|   |  |                |  |  | Rp. 63.880.000  | 0                      | 0                  | 0                | 0  | TW II  | 1. Pengumpulan Data Lapangan hasil survei<br>2. Verifikasi Lapangan data Hasil Survei<br>3. Pendampingan Penilaian Indeks Reformasi Hukum   | TW II  | -   | 1. Laporan Pengumpulan Data Lapangan<br>2. Laporan hasil Verifikasi hasil survei<br>3. Laporan Pendampingan IRH                        | Belum dilaksanakan  | - |
|   |  |                |  |  | Rp. 29.390.000  | 0                      | 0                  | 0                | 0  | TW III   | 1. Rapat Persentasi Hasil IPK-IKM<br>2. Pengumpulan Data Lapangan hasil survei<br>3. Verifikasi Lapangan data Hasil Survei<br>4. Pendampingan Penilaian Indeks Reformasi Hukum    | TW III   | -   | 1. Laporan Kegiatan<br>2. Laporan Pengumpulan Data Lapangan<br>3. Laporan hasil Verifikasi hasil survei<br>4. Laporan Pendampingan IRH | Belum dilaksanakan  | - |
|   |  |                |  |  | Rp. 650.000     | 0                      | 0                  | 0                | 0  | TW IV  | 1. Kordinasi dan Konsultasi ke Instansi Terkait   | TW IV  | -   | 1. Laporan Kegiatan<br>2. Laporan Pengumpulan Data Lapangan<br>3. Laporan hasil Verifikasi hasil survei<br>4. Laporan Pendampingan IRH | Belum dilaksanakan  | - |

4. DIVISI KEIMIGRASIAN KANTOR WILAYAH

| SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET KINERJA | RUMUS PERHITUNGAN   | KEGIATAN  | PAGU              | RENCANA PENARIKAN DANA | REALISASI ANGGARAN   | RENCANA KEGIATAN   | CAPAIAN  | DATA DUKUNG                                       | STATUS PELAKSANAAN  | KETERANGAN  |
|--|---|----------------|---|---|-------------------|------------------------|--|--|--|---|---|---|
| Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah | Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah | 3,30 (indeks)  | (Realisasi nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian / Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian) x 100% | Layanan penerbitan dokumen perjalanan RI, Layanan penerbitan izin tinggal | Rp. 875.925.000   | Rp. 220.000.000        | Rp. 0  | TW I<br>-Perjadin koordinasi ke Direktorat<br>-Perjadin kedaerah<br>-Pembinaan ke Kab. Balut<br>-Paket meeting luar kota sosialisasi mengenai e-paspor | TW I<br>-Perjadin koordinasi ke Dit. SISTIK perihal koordinasi hak akses utk Kadiv<br>-Perjadin ke Kab. Ampang koordinasi dengan Dinas Kominfo dan Kemenag terkait membahas peningkatan penerbitan e-paspor.<br>-Perjadin ke Kab. Luwuk menghadiri arahan Irjen di UPT di Luwuk<br>-Perjadin ke Jakarta dalam rangka koordinasi dgn Direktorat Visa perihal Golden Visa  | -Laporan Kegiatan<br>-Dokumentasi<br>-Surat Tugas | Telah dilaksanakan namun kegiatan ke Kab. Balut dan paket meeting direncanakan di bulan Maret | -Perkiraan Penyerapan sebesar Rp. 52.000.000,- ditahap download ADK<br>-Perkiraan Penyerapan sebesar Rp. 36.000.000,- ditahap SPM<br>-Perkiraan Penyerapan sebesar Rp. 36.000.000,- ditahap SPP |
|  |   |                |   |   | Rp. 220.000.000   | Rp. 0                  | TW II<br>-Perjadin koordinasi ke Direktorat<br>-Perjadin koordinasi dengan instansi terkait di kabupaten   | TW II  | -  | -Laporan Kegiatan<br>-Dokumentasi<br>-Surat Tugas | Belum dilaksanakan  | -   |
|  |   |                |   |   | Rp. 220.000.000   | Rp. 0                  | TW III<br>-Perjadin koordinasi ke direktorat<br>-Perjadin koordinasi dengan instansi terkait di kabupaten  | TW III   | -  | -Laporan Kegiatan<br>-Dokumentasi<br>-Surat Tugas | Belum dilaksanakan  | -   |
|  |   |                |   |   | Rp. 220.000.000   | Rp. 0                  | TW IV<br>-Perjadin konsultasi ke direktorat<br>-Perjadin koordinasi dengan instansi terkait di kabupaten<br>-Pembinaan ke pemerintah Kab. Bangkep  | TW IV  | -  | -Laporan Kegiatan<br>-Dokumentasi<br>-Surat Tugas | Belum dilaksanakan  | -   |
| Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah                                  | 3,14 (indeks)   |                | ((nilai internal x responden internal) + (nilai eksternal x responden eksternal)) / jumlah total responden internal dan eksternal                         | Intelijen, Penyidikan, TAK, Pengawasan, Pengaduan, Pencegahan             | Rp. 1.267.323.000 | Rp. 316.000.000        | Rp. 0  | TW I<br>-Pelaksanaan rapat Tim PORA<br>-Perjadin ke direktorat di jakarta<br>-Ops Intel<br>-Ops Mandiri  | TW I<br>-Rapat Tim PORA di Hotel BW dgn tema "Antisipasi Kerawanan Menjelang Pemilu 2024"<br>-Perjadin ke Jakarta di untuk menghadiri REKN Ditjen Imigrasi (Rakornis)<br>-Perjadin ke Direktorat Intelkim membahas persiapan Pemilu 2024<br>-Operasi Intelijen ke Luwuk dalam rangka Pengamanan Keimigrasian di Kanim Banggai sekaligus menghadiri arahan Irjen<br>-Operasi Intelijen ke Poso ke Hydro Power Plant | -Laporan Kegiatan<br>-Dokumentasi<br>-Surat Tugas | Telah Dilaksanakan namun ada beberapa operasi direncanakan pelaksanaannya di bulan Maret      | -Perkiraan Penyerapan sebesar Rp. 50.000.000,- ditahap SPP<br>-Perkiraan Penyerapan sebesar Rp. 25.000.000,- ditahap download ADK Sakti   |
|  |   |                |   |   | Rp. 316.000.000   | Rp. 0                  | TW II<br>-Perjadin menghadiri rapat timpora di daerah<br>-Perjadin pembinaan ke kanim daerah<br>-Ops Intel ke kabupaten<br>-Ops Mandiri ke kabupaten<br>-Ops gabungan dgn anggota timpora provinsi | TW II  | -  | -Laporan Kegiatan<br>-Dokumentasi<br>-Surat Tugas | Belum dilaksanakan  | -   |
|  |   |                |   |   | Rp. 316.000.000   | Rp. 0                  | TW III<br>-Penguatan Tusi berupa FGD membahas penguatan pada desa binaan<br>-Perjadin konsultasi ke direktorat<br>-Ops Intel ke kabupaten<br>-Ops Mandiri ke kabupaten                             | TW III   | -  | -Laporan Kegiatan<br>-Dokumentasi<br>-Surat Tugas | Belum dilaksanakan  | -   |
|  |   |                |   |   | Rp. 316.000.000   | Rp. 0                  | TW IV<br>-Perjadin monev ke kanim<br>-Perjadin konsultasi ke direktorat<br>-Ops Intel ke kabupaten<br>-Ops Mandiri ke kabupaten  | TW IV  | -  | -Laporan Kegiatan<br>-Dokumentasi<br>-Surat Tugas | Belum dilaksanakan  | -   |



Palu, 1 Maret 2024  
Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Hermansyah Siregar  
NIP. 197010161993031001